

Dou Donggo Menggugat: Sebuah Gejolak Sosial di Bima Era Orde Baru

Aksa

Dosen Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab
dan Humaniora UIN Alauddin Makassar
aksa131288@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang gejolak sosial yang terjadi di daerah Bima pada masa Orde Baru. Gejolak sosial dalam bentuk gerakan protes massa berawal dari sikap dan kebijakan Letkol (Purn) Soeharmadji selama menjadi kepala Pemerintahan daerah tingkat II Bima. Sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru, Letkol (Purn) Soeharmadji menjalankan politik hegemoni dan dominasi dengan cara intimidasi. Gejolak sosial ditandai dengan bersatunya elit-elit lokal dalam membangkitkan kesadaran massa. Para tokoh dari Donggo mulai menggerakkan massa 'menggugat' rezim Soeharmadji yang cenderung represif dan diskriminatif di daerah Bima. Gerakan sosial dalam bentuk gerakan protes masyarakat memuncak pada tanggal 22 Juni 1972 muncul dari masyarakat kalangan bawah. Tampilnya masyarakat Donggo menggugat rezim Soeharmadji mengundang simpati dan antipati dari media massa, baik media lokal maupun media nasional. Aksi massa justru dituding oleh pemerintah sebagai tindakan makar. Tulisan ini bertujuan menjelaskan tentang gejolak sosial yang terjadi Bima sejak bersatunya elit-elit lokal dalam merancang strategi gerakan, dan menggelar aksi massa serta sorotan dari berbagai media baik lokal dan nasional. Metode yang digunakan yaitu metode penulisan sejarah (heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan historiografi). Metode penulisan berguna untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif demi mencapai kesimpulan yang utuh.

Kata Kunci : Gejolak Sosial, Donggo, Bima, Orde Baru.

Abstract

This paper describes the social upheavals that occurred in the Bima area during the New Order. Social turmoil in the form of mass protests originated from the attitudes and policies of Lieutenant Colonel (Ret.) Soeharmadji during his time as head of the Bima level II regional government. As an extension of the New Order regime, Lt. Col. (Ret.) Soeharmadji carried out the politics of hegemony and domination through intimidation. Social unrest is marked by the union of local elites in mass awareness. The figures from Donggo began to mobilize the masses to 'sue' the Soeharmadji regime which represented repressive and discriminatory in the Bima area. The social movement in the form of a community protest movement peaked on June 22, 1972, arising from the lower classes of society. The appearance of the Donggo community sued the Soeharmadji regime asking for sympathy and antipathy from the mass media, both local and national media. The mass protest was accused by the government of being treason. This paper discusses the social upheaval that occurred in Bima since the unity of local

elites in the improvement strategy, and held mass actions and highlights from various local and national media. The method used is the historical conversion method (heuristic, source criticism, verification, and historiography). A useful method for reconstructing a complete and objective past in order to reach a complete conclusion.

Keywords: Social Turmoil, Donggo, Bima, New Order.

A. PENDAHULUAN

Menjelang kejatuhan Ir. Soekarno, kondisi perpolitikan Indonesia diwarnai oleh konflik Ideologi. Kondisi demikian melahirkan malapetaka sosial yang sangat menentukan arah krisis bangsa, oleh Arendt menyebutnya sebagai krisis yang berwajah ganda yaitu krisis dibidang ekonomi dan bidang pilitik, dalam sosial ekonomi, terjadi kemerosotan dan stagnasi (Arendt, 1983: 3). Sedangkan dalam bidang politik terjadi ketidakstabilan karena pertentangan antar kelompok-kelompok politik dalam masyarakat (Thaba, 1996: 186). Krisis yang terjadi di rezim lama (Orde Lama), berusaha dihilangkan oleh penguasa rezim baru (Orde Baru). Soeharto sebagai pemegang tampuk kekuasaan tunggal rezim Orde Baru berusaha menata kehidupan berbangsa dan bernegara secara radikal, mengembalikan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Rezim Orde Baru mulai akhir dekade 1960-an mampu melakukan pemulihan (*recovery*) ekonomi yang begitu cepat dari keadaan yang begitu buruk pada masa rezim Orde Lama, dan yang pertama-tama terwujud adalah tajamnya penurunan inflasi dan mulai meningkatnya pertumbuhan (Prawiro, 1998: 33-35). Dalam kaitannya dengan penanganan inflasi di sekitar tahun 1966-1968, Indonesia memperoleh julukan sebagai salah satu negara pengendali inflasi paling efektif di abad ke 20 (Hill, 1996: 4).

Bersamaan dengan pembangunan ekonomi, negara juga membangun bidang politik, yang dikonsepsikan sebagai stabilitas politik, yaitu suatu kondisi keamanan dalam negeri harus tetap terjaga, tidak ada oposisi dari kelompok-kelompok sipil warga masyarakat atau kekuatan-kekuatan politik lain. Asumsinya bahwa stabilitas politik menjadi prasyarat imperatif bagi kelancaran pembangunan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan stabilitas politik, tentu negara melakukan berbagai tindakan represif bagi siapa pun yang dipersepsikannya bisa mengganggu jalannya pembangunan ekonomi atau umumnya keamanan negara (Feith: 1980: 72). Satu prestasi gemilang pemerintahan Orde Baru adalah kemampuannya dalam menciptakan stabilitas politik dengan pemerintahan yang kuat. Dengan kemampuan inilah, Orde Baru bisa membangun landasan bagi keberhasilan di sektor lainnya, terutama mengalirnya investasi asing yang membawa pertumbuhan ekonomi makro yang menakjubkan. Kekuasaan politik Orde Baru yang efektif berakar dari empat sumber utama, yaitu represif fisik dan hukum, klientelisme ekonomi, wacana politik partikularistik yang otoritarianisme, dan pengembangan korporatisme negara (Praktikno, 1998: 20).

Namun, dibalik prestasi gemilangnya, Orde Baru di bawah kendali rezim yang otoriter dan militeristik telah mengundang reaksi dari kalangan masyarakat yang tidak puas dengan berbagai kebijakannya. Gejolak sosial mulai bermunculan di berbagai daerah dengan motif yang sama 'menggugat' represifitas rezim. Meskipun demikian, terdapat pula beberapa gejolak sosial yang mempunyai tujuan dan motif lain tetapi semuanya muncul akibat represifitas rezim dan berbagai kebijakan yang diterapkannya. Beberapa aksi protes massa yang pernah terjadi diantaranya adalah gerakan massa yang dikenal dengan Peristiwa Malari 1974, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Lampung 1989, dan Peristiwa penyergapan Pesawat DC Wayla 1981. Khusus di Kawasan Timur Indonesia juga muncul beberapa gejolak sosial, salah satunya adalah gerakan sosial di Bima (Bima Bergejolak). Peristiwa ini lebih populer dikenal dengan istilah 'Peristiwa Donggo 1972'.

Bima Bergejolak atau Peristiwa Donggo 1972 lahir sebagai ekspresi kekecewaan *Dou Donggo* dari berbagai perlakuan represif dan diskriminatif pemerintah yang ada di Kabupaten Bima. Soeharmadji yang menjadi Bupati di Kabupaten Bima periode (1967-1974) adalah seorang anggota militer berpangkat Letnan Kolonel yang diutus oleh pemerintah pusat sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Sejak awal memimpin Kabupaten Bima, Soeharmadji sebagaimana rezim Orde Baru di tingkat lokal lainnya, menjalankan sistem politik secara otoriter, hegemonik dan militeristik yang disertai dengan tindakan-tindakan represif. Karena itu, *Dou Donggo* menggugat Bupati Bima yang dinilainya represif dan kurang memperhatikan pembangunan di *Dana Donggo* dengan menggerakkan massa menuntut keadilan dan pemerataan pembangunan di *Dana Mbojo*. Tulisan ini menjelaskan tentang sebuah gejolak sosial di Bima mulai dari bersatunya elit-elit dalam membangun opini publik, merancang strategi gerakan, dan menggelar aksi massa sehingga mendapat sorotan dari berbagai media baik media lokal, media nasional bahkan media internasional.

B. METODE PENELITIAN

Pada prinsipnya, metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini mengikuti metode penulisan dalam disiplin ilmu sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Heuristik yaitu pengumpulan data atau sumber melalui kajian pustaka, wawancara dan dokumentasi. Penelitian pustaka dilakukan untuk mencari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berhubungan langsung dengan tulisan ini sebagai bahan kajian pustaka, guna memperkuat data dalam penulisan. Wawancara dilakukan lewat percakapan atau sumber lisan. Informan yang diwawancara adalah pelaku sejarah, saksi sejarah, sejarawan lokal maupun orang-orang yang mengerti dan paham dengan peristiwa tersebut. Dokumentasi dan kajian dokumenter sebagai salah satu langkah yang digunakan untuk menelusuri dan mendokumentasikan data sejarah, foto-foto saat kejadian tentu menjadi data penguat dan bahan kajian dokumenter, serta hasil kajian pustaka dan wawancara didokumentasikan untuk memudahkan verifikasi dan interpretasi. Karena tulisan ini dalam sudut pandang sejarah lokal, maka sumber data yang

dikumpulkan dan dihasilkan harus benar-benar memperhatikan aspek kelokalan masyarakat setempat. Artinya sejarah yang ditemukan dan diciptakan dari sudut pandang masyarakat bawah.

Kritik Sumber dilakukan untuk memverifikasi terkait autentisitas, kredibilitas dan validitas data-data sejarah. Setiap sumber memiliki aspek eksteren dan interen. Aspek eksteren berkaitan dengan validitas sumber yang dibutuhkan, sedangkan aspek internnya berkaitan dengan apakah sumber sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Hal yang paling ditekankan disini adalah aspek "dalam" yaitu isi sumber yang didapatkan. Sumber yang didapatkan harus logis dan mendalam isinya.

Interpretasi. Pada tahap ini sangat diperlukan kehati-hatian untuk menganalisis dan mensintesis data yang tersaring melalui kritik sumber dengan ketelitian, kecermatan dan sikap menghindari subyektifitas terhadap fakta sejarah serta mengimajinasikan kata-kata dengan tetap mengacu pada sumber-sumber yang ada. Interpretasi meliputi dua hal yaitu analisis (penguraian) dan sintesis (kepercayaan). Tahap ini, penulis telah mencurahkan semua kekuatan menghidupkan data-data yang lulus verifikasi dan mengimajinasikan kata-kata dengan tetap mengacu pada sumber-sumber ada.

Historiografi atau penulisan sejarah yaitu pemaparan, atau perolehan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan melalui tahapan heuristik, kritik sumber dan interpretasi. Pada tahap ini, penulis juga berusaha untuk memahami realitas sejarah yang terjadi sehingga dapat menghasilkan karya sejarah yang tidak hanya menggambarkan suatu peristiwa sejarah, tetapi juga menghasilkan makna dari peristiwa itu sendiri berdasarkan analisis historis

C. KAJIAN TEORITIS

Tulisan ini perlu acuan teoritis sebagai pisau analisis dalam mempermudah dan mempertajam daya analisa peristiwa sejarah yang ditulis tentunya didukung dengan fakta dan data yang ada. Oleh karena itu, tulisan ini perlu disoroti dengan menggunakan teori hegemoni, teori solidaritas sosial, dan teori gerakan sosial. Teori hegemoni dikemukakan untuk melihat sejauhmana peran serta elit-elit lokal dalam mempengaruhi massa dari *Dana Donggo*. Kedudukan elite dalam konsep hegemoninya Gramscian berperan sebagai kelompok kecil dari suatu masyarakat yang dihormati, disegani, kaya dan memiliki kekuasaan. Mereka adalah kelompok minoritas superior pada tingkat atas dari susunan masyarakat, yang memiliki kemampuan untuk mengontrol kegiatan ekonomi dan dalam beberapa hal mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan (Yusron, 2009: 68). Dalam konteks *Dou Donggo*, elit-elit lokal tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol kegiatan perekonomian tetapi mereka mempunyai kharisma dan ketokohan dalam mempengaruhi massa.

Selain karena peran tokoh-tokoh lokal dalam mempengaruhi massa, faktor utama karena adanya rasa solidaritas. Solidaritas Sosial dalam kelompok kesukuan sebagai etnis Donggo sangat menentukan atas bersatunya massa dari Donggo dalam menggugat rezim Orde Baru di Bima. Sebagaimana dalam

terminologi Weberian, solidaritas sosial berarti kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang berdasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan masyarakat yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Jones, 2009: 123).

Rasa solidaritas inilah yang menjadi spirit kebersamaan dan kekuatan massa dalam membangun gerakan sosial. Selain itu gerakan sosial yang melibatkan *Dou Donggo* di Bima secara umum berasal dari kalangan bawah (kaum tani). Hal ini sejalan dengan penjelasan Sartono Kartodirdjo bahwa gerakan sosial adalah perjuangan yang dilakukan oleh segenap golongan sosial tertentu terhadap eksploitasi ekonomi, politik, sosial, agama, dan kultural dari kelompok yang menekan, baik itu dari pihak yang menekan maupun dari para penguasa. Umumnya yang melakukan aksi gerakan sosial itu dilakukan oleh kelompok marginal seperti kaum tani dan buruh (Kartodirdjo, 1992: 86).

Jadi, gerakan sosial dapat diartikan sebagai gabungan individu-individu yang bergabung dalam satu kelompok sosial yang melakukan protes untuk mencapai tujuan tertentu sekaligus perubahan sosial dalam masyarakat demi menjaga keutuhan atau lestariannya pola-pola lembaga yang ada. Dengan kata lain, gerakan sosial (*social movement*) merupakan tindakan kolektif (*collective action*) yang terorganisir secara longgar, tanpa terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Gerakan sosial ini lahir dari suatu kelompok orang yang tidak puas terhadap keadaan yang ada dan semakin berkembang dan meluas ketidakpuasan serta tidak berfungsinya institusi-institusi yang mampu berperan secara fleksibel untuk meresponnya.

D. PEMBAHASAN

1. Bersatunya Elit-elit Lokal di *Dana Donggo*

Kekuatan dan nilai solidaritas massa dari *Donggo* yang berani menggugat rezim Orde Baru di Bima, tidak lepas dari peran serta elit-elit lokal yang ikut mempengaruhi dan membangkitkan spirit perjuangan masyarakat setempat. Tokoh-tokoh penggerak peristiwa *Donggo* terdiri dari berbagai kalangan baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh politik, tokoh kebatinan/mistisisme, tokoh spiritual termasuk tokoh dari kalangan muda. Gerakan sosial yang terjadi di Bima Era Orde Baru merupakan sebuah gerakan sosial yang digerakkan oleh gabungan elit-elit lokal yang berpengaruh di Kecamatan *Donggo*. Tanpa menafikan peran yang lain terutama peran masyarakat kalangan bawah sebagai kekuatan massa demonstran, elit-elit yang menjadi tokoh sentral dalam peristiwa tersebut ada lima orang antara lain:

Tuan Guru KH. Abdul Madjid Bakry yang lebih dikenal sebagai tokoh Ulama. H. Kako yang diasosiasikan sebagai tokoh kebatinan (tokoh mistisisme lokal. Jamaluddin H. Yasin dan Muhammad Ali sebagai representasi elit-elit Desa yang berpengaruh-Galarang (Kepala Desa) dan Abas Oya BA sebagai representase kaum intelektual sekaligus mewakili kaum intelektual muda yang merupakan aktivis jebolan Universitas Mustopo (Beragama) Jakarta (Magenda dalam Mustahid dan Ama La Nora, 2017: xxxvi). Kiprahnya sebelum merancang dan

menggerakkan sebuah gerakan sosial sempit menggemparkan *Dana Mbojo* dan mendapat sorotan media lokal, nasional maupun internasional. Kelima tokoh tersebut mempunyai kharisma dan kepribadiannya masing-masing baik dalam mempengaruhi massa maupun dari karakter dan kewibawaannya menjadi contoh tersendiri bagi masyarakat Donggo. Sepak terjang kelima tokoh tersebut antara lain;

Abdul Madjid Bakry merupakan salah satu tokoh senior dalam pergerakan Islam di Bima. Pengenalannya dengan dunia pergerakan Islam dimulai sejak dirinya mengenyam pendidikan di Darul Ulum Bima (1941-1945). Sebelumnya ia pernah berguru langsung dengan KH. Ibrahim, seorang ulama kharismatik asal Desa Sila-Rato, Bolo-Bima. Setelah selesai menimba ilmu di Darul Ulum Bima, dirinya berinisiatif membuka beberapa sekolah di Donggo. Salah satu sekolah yang cukup terkenal yang ia bangun saat itu ialah Darul Ulum Doridungga (1953-1956). Sebelum "Peristiwa Donggo 1972", dirinya sempat menghadapi tindakan represif aparat keamanan dan dibawa paksa ke Mapolres Bima atas keterlibatannya dalam "Peristiwa Grahamassa 1969 di Donggo". Faktor keberanian dan kegigihannya dalam menegakkan kebenaran secara genetik tertular dari kakeknya yang pernah menjadi Kepala Kesatuan Anangguru *Mboda* yang diteruskan oleh Bapaknya yang bernama Pangka menjadi anggota *Mboda* pada masa Sultan Abdul Hamid bertahta di Kesultanan Bima. *Mboda* merupakan satuan keamanan di rumah Raja Bicara atau yang sering dikenal dengan (Ketua Dewan Hadat Kesultanan Bima).

Nama lain yang tak kalah penting adalah H. Kako Bungko yang sejak lama dikenal oleh *Dou Donggo* sebagai sosok yang memiliki ilmu sakti mandraguna. Karena kesaktian dan ilmu kekebalan yang dimilikinya, ia menjadi sosok sentral dalam dunia kebatinan di Donggo. Dari kelima tokoh sentral penggerak massa, H. Kako satu-satunya yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Akan tetapi dengan kewibawaan dan kharismanya, tokoh ini terbukti mampu menggerakkan massa dari *Dana Donggo* dalam jumlah yang cukup banyak. Selain Abdul Madjid Bakry dan H. Kako Bungko, juga terdapat sosok yang menjadi arsitek gerakan dalam 'Peristiwa Donggo 1972' yaitu Abas Oya. Ia merupakan aktor intelektual yang mendesain gerakan sosial. Abas Oya adalah mahasiswa sekaligus aktivis jebolan Universitas Moestopo (beragama) Jakarta. Selama mengenyam pendidikan di Jakarta, ia aktif diberbagai organisasi kemahasiswaan baik di internal kampus maupun eksternal kampus termasuk organisasi kedaerahan.

Nama lain yang tak kalah penting adalah Muhammad Ali Taamin (H. Ale) dan Jamaluddin H. Yasin. Keduanya mewakili pejabat pemerintahan tingkat Desa. M. Ali Taamin (H. Ale) sebagai Wakil Kepala Desa O'O dan Jamaluddin H. Yasin Wakil Kepala Desa Kala waktu itu. Posisi mereka sebagai pejabat pemerintah tingkat Desa tentu memberi pengaruh yang cukup berarti dalam menggerakkan massa. Keduanya tampil menjadi garda terdepan membela kepentingan masyarakat Donggo yang saat itu ,asih jauh tertinggal dibanding kecamatan-kecamatan lainnya di daerah Bima

Kolaborasi kelima elit-elit lokal yang dianggap sebagai tokoh-tokoh sentral dalam mendesain dan mengatur strategi, telah memberi spirit tersendiri dalam

membangkitkan semangat perjuangan masyarakat yang berasal dari *Dana Donggo*. Dengan bermodal keberanian dari tokoh-tokoh lokal, semangat perjuangan massa ikut mendukung dalam merekatkan kekuatan massa. Rasa solidaritas *Dou Donggo* tentunya terbangun atas dasar etnis Ke-Donggo-an. Abas Oya sebagai mantan aktivis Ibu kota, sekaligus alumni dari Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta, hadir sebagai arsitek intelektual dalam mendesain gerakan massa. Ketimpangan pembangunan yang sedang terjadi di *Dana Mbojo* menjadi isu yang seksi diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Melalui moment tersebut, Abas Oya hadir menyadarkan massa dalam melawan ketidakadilan dan diskriminasi rezim Soeharmadji di Bima.

Selain Abas Oya, Muhammad Ali Ta'amin selalu tampil mewakili pemerintah desa, siap mensugesti massa sehingga massa termobilisasi dengan baik dari seluruh penjuru *Dana Donggo*. begitu pula dengan H. Jamaludin Yasin cukup dikenal sebagai agitator dan orator yang vokal. Ia bersama Muhammad Ali Ta'amin ikut mengambil bagian dalam menentang ketidakadilan, siap membela kebenaran walaupun harus dibayar dengan nyawa. Adapun Abdul Majid Bakry sebagai representase tokoh agama, tampil di garda terdepan dalam menggugat rezim Soeharmadji. Sudah menjadi tugas para ulama bahwa menegakkan amar makruf nahi mungkar, adalah salah satu langkah kongkrit menerjemahkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an.

Sedangkan H. Kako sebagai sosok yang di-tua-kan, tentu kata-katanya selalu didengar oleh *Dou Donggo*. H. Kako tampil sebagai tokoh kebatinan yang berhasil mensugestis *Dou Donggo* lewat unsur-unsur tradisional berbasis spritualitas. Kombinasi dari lima kepribadian dan kharisma elit-elit lokal tersebut telah berhasil menggalang massa menentang rezim Soeharmadji yang dinilainya terlalu rakus dan otoriter dalam menjalankan kekuasaan di *Dana Mbojo*.

2. Merancang Strategi Gerakan

Dalam merespon keinginan bersama masyarakat setempat, *Dou Donggo* bersama elit-elit Donggo menggelar rapat perdana yang bertempat di rumahnya M. Ali Taamin di Desa OO, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Abas Oya dengan menghasilkan 6 (enam) keputusan penting antara lain: *Pertama*. Guru-guru SDN di Donggo yang dikoordinir oleh M. Tayeb asal Desa Rasabou, Kecamatan Bolo ditugasi membuat spanduk dan pamflet yang berisikan tuntutan masyarakat Donggo. *Kedua*. Demonstran rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1972 dan dipimpin langsung oleh lima tokoh yang menginisiasi aksi massa. *Ketiga*. Seluruh masyarakat Donggo harus diikuti kecuai, ibu-ibu hamil, orang tua usia lanjut, dan anak-anak serta orang-orang tertentu yang ditugasnya menjaga setiap kampung-kampung yang ada di Kecamatan Donggo. *Keempat*. Penentuan rute perjalanan aksi massa (dari titik star awal sampai titik tujuan akhir). *Kelima*. Demonstran diwajibkan membawa senjata tajam seperti parang, golok, dan benda-benda lainnya, demi menjaga diri saat kembali ke Donggo di malam hari dan untuk mengantisipasi adanya serangan binatang buas terutama dari serangan babi hutan. *Keenam*. Selama aksi massa berlangsung, masyarakat Donggo diminta

mengontrol diri demi menjaga keamanan dan ketertiban serta kehormatan dirinya (Mustahid dan Ama La Nora, 2017: 134-135).

Demi lancarnya komunikasi dan kerahasiaan aksi, maka Gong Langgulung digunakan sebagai media komunikasi yang bersifat non verbal. Gong Langgulung dipukul dengan beberapa sandi lewat simbol dentuman sesuai kesepakatan dalam rapat. Simbol-simbol dentuman antara lain; *Pertama*, Jika dentuman pendek satu kali berarti memberitahukan kepada masyarakat bahwa aksi demonstrasi akan 'jadi' dilaksanakan. *Kedua*, dentuman dua kali mengisyaratkan kepada masyarakat agar segera berkumpul di posko masing-masing berdasarkan kesepakatan dalam rapat adat. *Ketiga*, Dentuman panjang tiga kali mengingatkan kepada ketua kelompok yang sudah berkumpul di posko masing-masing agar segera merapat dan berkumpul ke posko pusat guna final checking jumlah massa yang berkumpul. *Keempat*, jika Gong terdengar dentuman panjang empat kali berarti aksi massa dibatalkan, sekaligus isyarat bagi setiap ketua kelompok untuk datang (atau mengirim kurir) ke posko pusat guna mencari tahu alasan pembatalan aksi. *Kelima*, dentuman panjang secara terus menerus mengisyaratkan adanya keadaan darurat, semua masa segera siaga satu sambil menunggu dentuman susulan sebanyak dua kali untuk hadir dengan persenjataan lengkap (parang, tombak, panah, bedil rakitan) ke posko pusat (Mustahid dan Ama La Nora, 2017: 68-69).

Rute perjalanan yang direncanakan berdasarkan hasil kesepakatan ada dua opsi; *Pertama*. Masyarakat akan star dari Desa OO melewati Desa Doridungga sampai ke Desa Bajo. Sampai di Desa Bajo, sebagian masyarakat melewati jalur laut dan sebagiannya melewati jalur darat. Sebagian massa yang melewati jalur laut menggunakan sampan dari Bajo menuju Kota Bima dan sebagiannya lagi menggunakan jalur darat dengan jalan kaki menelusuri bibir pantai dari Dari Desa Bajo melewati Kecamatan Bolo, Woha dan Palebelo sampai ke Kota Bima. Pembagian massa dengan dua jalur dengan maksud untuk memecahkan konsentrasi dari ABRI dalam menghadang massa, apabila massa yang melewati jalur laut dihadang oleh pihak aparat keamanan, maka massa yang jalan kaki bisa sampai di Kota Bima, begitu pun sebaliknya. *Kedua*. Masyarakat Donggo memulai titik awal aksinya di Desa OO, melewati Dusun Mpili dan Kamunti, menuju Kecamatan Bolo (Desa Tumpu lanjut ke Desa Daru, Desa Sondosia), melewati Desa Talabiu, dan Desa Pandai Kecamatan Woha sampai masuk ke Kota Bima.

Kesepakatan melewati jalur laut sesuai opsi pertama digagalkan oleh Masyarakat Donggo karena informasi keberangkatan massa sudah sampai ke telinga aparat keamanan. Akibatnya, pihak keamanan dengan senjata lengkapnya mengumumkan keadaan siaga satu, di sepanjang pinggir pantai sebelah barat Kota Bima dari pantai Ule ke Desa Kolo selalu dipantau dan diawasi langsung oleh ABRI/POLRI, siap menghadang massa dari Donggo yang menyebrang laut dengan memakai sampan. Selain itu, pihak aparat keamanan melakukan sweeping terhadap pelajar dan mahasiswa yang menempati rumah kos-kosan dan kontrakan sekitar Kota Bima. Puluhan pelajar tingkat SLTP dan SLTA ditahan dan diintrogasi. Sebagian pelajar yang selamat dari sweeping inilah, mengirim informasi ke masyarakat Donggo hingga informasi sampai ke Posko Pusat.

3. Dou Donggo Menggelar Aksi Massa (Long March)

Sebelum aksi massa dimulai, Masyarakat Donggo terlebih dahulu berkumpul di Sekretariat dan Pasangerahan. Dari Pasangerahan, massa berjalan kaki dari Desa OO melewati Dusun Mpili dan Dusun Kamunti Kecamatan Donggo menuju Dusun Kancoa Rida Kecamatan Bolo. Sampai di Dusun Kancoa Rida, mereka istirahat sejenak dan melaksanakan sholat dzuhur berjamaah. Dari Kancoa Rida Kecamatan Bolo mereka melanjutkan perjalanan menuju Kota Bima melewati Kecamatan Woha, Kecamatan Palibelo, sampai ke Kantor Bupati yang berpusat di Kota Bima. Massa aksi meneriakkan yel-yel dan membawa spanduk yang berisikan tuntutan atas Bupati Bima. Dalam perjalanan *long march*-nya, para pemimpin gerakan sesekali memompa semangat massa dengan suara pekikan takbir, melantunkan sholawat, dan kalimat-kalimat pujian kepada Allah SWT berupa tahmid dan tahlil.

Dou Donggo yang melakukan aksi massa dipimpin langsung oleh Abas Oya, seorang aktivis ibukota sekaligus intelektual muda jebolan Universitas Moetopo (Beragama) Jakarta. Sementara dua elit pemerintah tingkat desa, Jamaluddin H. Yasin dan Muhammad Ali Ta'amin menempati posisi sebagai gerda terdepan dalam mengorganisir massa. Adapun ulama muda Abdul Madjid Bakry selalu berada di tengah-tengah massa, sedangkan H. Kako Bungko mengawal massa dari barisan belakang. *Dou Donggo* terus melanjutkan *long march*-nya dengan berjalan kaki dan baru tiba di Dusun Muku Kecamatan Bolo sekitar pukul 16.00 WITA. *Dou Donggo* berhenti sejenak di Desa Muku melaksanakan sholat Ashar berjamaah, dan melanjutkan *long march* melintasi jalan Negara (Jalan Lintas Bima-Sumbawa).

Tanpa diduga oleh massa dari Donggo, di Desa Pandai Kecamatan Woha sekitar pukul 18.30 WITA, Pemerintah Kabupaten Bima sudah lebih awal menunggu kedatangan massa dari Donggo. Penghadangan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima, yang terdiri dari Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), anggota DPRD Kabupaten Tingkat II Bima, Kepala Hubungan Masyarakat (Kahumas), dan Kapala Sosial Politik (Kasospol). Penghadangan dari unsur Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima diback-up oleh ratusan personil ABRI.

Jalan Desa Pandai sudah dijaga secara ketat oleh aparat keamanan lengkap dengan senjata laras panjangnya. ABRI/Polri yang menjaga keamanan dipimpin langsung oleh Kapten Inf. Zainuddin AG, seorang Komandan Kompi (Danki) senapan A Batalyon Infanteri 742 Satya Wira Yudha Bima. Suasana sempat mencekam ketika sebagian massa mengamuk dan mencoba menerobos Brikade ABRI/Polri. Namun cepat mereda setelah Jamaluddin H Yasin mengambil alih posisi koordinator lapangan aksi. Ia menenangkan massa agar tidak terpancing dengan penghadangan pihak keamanan maupun provokator yang hendak merusak aksi damai dan tetap tenang berada pada barisan masing-masing. Sementara anggota Dewan yang hadir bertindak sebagai juru bicara dalam menghadapi massa demonstran.

Upaya persuasif anggota Dewan ini dilakukan agar massa melunak dan menuruti kemauan rezim Soeharmadji. Paling tidak *Dou Donggo* akan

menggurungkan niatnya memasuki Kota Bima dalam rangka menyalurkan aspirasinya. Jalan tengah dari hasil negosiasi antara *Dou Donggo* dengan anggota pihak pemerintah Kabupaten Bima yang diwakili oleh Muspida dan TNI/Polri di Desa Pandai melahirkan 'Kesepakatan Pandai'. Yang memuat tiga point penting antara lain; *Pertama*. Pemerintah Kabupaten Bima dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (Kimpraswil) harus memperhatikan infrastruktur (mengaspal jalan darat) sebagai akses jalan menuju Kecamatan Donggo. *Kedua*, Kepala dinas pertanian berjanji akan memberikan bibit unggul berupa, padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya. Dinas perkebunan akan memberikan bibit manga, nangka untuk ditanam di sepanjang pesisir pantai mulai dari Lewidewa, Lewintana, Bajo, Sarita, Puntti, Sowa, Sai, sampai Sampungu, dan Dinas peternakan yang sedang dijabat oleh Pohan akan memberikan bantuan berupa sapi unggul kepada masyarakat untuk dipelihara dan ditenak. *Ketiga*. Kepala Dinas Kehutanan (saat itu di bawah pimpinan Sumantri) berjanji akan memberikan bantuan berupa bibit jati dan bibit-bibit lainnya demi reboisasi hutan yang gundul di Kecamatan Donggo, serta memprioritaskan pembangunan Masjid megah di Desa OO sebagai ibukota Kecamatan Donggo (H. Kako dan Ama La Nora, 2017, 62-63).

Jalan darat menuju Kecamatan Donggo yang dimaksud dalam point pertama diantaranya dimulai dari Kecamatan Bolo (Pertigaan jalan cabang Donggo) menuju Desa Bajo Kecamatan Donggo (sekarang Desa Bajo menjadi bagian dari Kecamatan Soromandi, hasil pemekaran dari Kecamatan Donggo) sampai menuju Desa OO sebagai ibukota Kecamatan Donggo, jalan dari Kecamatan Bolo (Kancoa Rida) menuju Desa Mbawa Kecamatan Donggo, jalan dari Desa Tumpu (Kecamatan Bolo) menuju Kamunti dan Mpili (Sekarang kedua Kampung masing-masing berubah statusnya menjadi Desa, sebelumnya kedua Desa tersebut menjadi bagian dari Desa OO), jalan dari Desa Rora (Perbatasan Bima-Dompu) menuju Desa Ndano Mango dan Desa Bumi Pajo (dua Desa ini sebelumnya menjadi bagian dari Desa Rora), Jalan dari Desa Tololara dan Desa Ndano (Kecamatan Mada Pangga) menuju Desa Palama (Kecamatan Donggo), dan beberapa ruas jalan lain di wilayah kecamatan Donggo.

M. Nor Husen (salah seorang dari 10 anggota DPRD Kabupaten Bima), meminta keikhlasan massa agar tidak meneruskan *long march* ke Kota Bima dan kembali ke rumahnya masing-masing dengan catatan semua aspirasi yang tertuang dalam "Kesepakatan Pandai" akan segera di realisasikan. Hasil "Kesepakatan Pandai" diserahkan langsung oleh Jamaluddin H. Yasin kepada rombongan Muspida dan DPRD Tingkat II Pemkab tingkat II Bima, yang didampingi oleh Komandan Kompi (Danki) senapan A Batalyon Infanteri 742 Satya Wira Yudha Bima, Kapten Inf. Zainuddin AG. Hasil Kesepakatan Pandai setelah diterima oleh pihak pemerintah, dan kedua belah pihak (pihak Pemerintah dan massa dari Donggo) sepakat kembali tempat masing-masing. Pengunjuk rasa di bawah pimpinan kelima tokoh kembali ke Donggo dengan berjalan kaki. Sedangkan rombongan DPRD dan Muspida Pemkab tingkat II Bima, pulang membawa hasil "Kesepakatan Pandai" beriringan menggunakan mobil dinas di bawah pengawalan ABRI/Polri (H. Kako dan La Nora, 2017: 64-65).

Dengan demikian, sembari menunggu jawaban terkait janji pemerintah, massa kembali berjalan kaki menelusuri jalur keberangkatan awal dari Desa Pandai, Sanolo, Sondosia, Daru, Sila-Leu, ke Desa Tumpu. Di Desa tumpu ada sebagian yang melewati jalan menuju Kamunti, bagi warga Kamunti, Mpili, dan Duha Ni'u, sebagian besarnya banyak yang melewati pinggir pantai dari Desa Tumpu ke Desa Rada, Nggeru, (Kecamatan Bolo), menuju Lewidewa, Lewintana hingga ke Desa Bajo. Setelah sampai di Desa Bajo, sebagian *Dou Donggo* melanjutkan perjalanannya ke Ndano Ndere, ada juga yang ke Doridungga dan yang berasal dari Desa O'O dan Kala baru sampai di Desa-nya sekitar pukul 05.00 WITA. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, dengan jarak tempuh sekitar 40 kilometer. Keesokan harinya masyarakat yang mengikuti *long march*, secara bersama-sama mensosialisasikan kepada rakyat yang tidak sempat ikut dalam aksi seputar hasil kesepakatan massa demonstran dengan pemerintah di Desa Pandai.

4. Aksi Massa Menjadi Sorotan Media

Setelah aksi massa berlangsung, keesokan harinya (tanggal 23 Juni 1972) peristiwa itu menjadi pembicaraan hangat di berbagai media massa baik media lokal, media nasional maupun media internasional. Media-media yang sempat meliput dan memberitakan aksi Massa tanggal 22 Juni 1972 di Bima diantaranya Harian KAMI, Harian Abadi, Suara Karya, Harian Buana, Harian Angkatan Bersenjata, Harian Sinar Pagi, Kompas Harian Jakarta, Harian Terbit, Sinar Harapan, Majalah, Pos Kota, RRI bahkan media massa internasional ikut memberitakan peristiwa Donggo seperti BBC London, dan Voa Amerika (H. Kako dan Ama La Nora, 2017: 65).

Beragam berita seputar peristiwa yang sempat menggetarkan Bumi Gora, mulai dari pemberitaan yang sifatnya konstruktif sampai yang dekonstruktif. Aksi massa menaruh simpati dan bahkan antipasti dari media, mulai dari pemberitaan yang sifatnya biasa-biasa saja sampai berita yang sifatnya provokatif. Beberapa pemberitaan pasca aksi massa tanggal 22 Juni 2020 diantaranya yaitu berita di *Harian KAMI* pada tanggal 30 Juni 1972. *Harian KAMI* memuat berita yang berjudul "3000 Penduduk Bima demonstrasi Tuntut Mundur Bupati". Berita ini merupakan salah satu pemberitaan yang dinilai obyektif oleh masyarakat dan aktivis, bahwa demonstrasi di Bima menuntut mundur Bupati Bima yang cenderung otoriter dan mengabaikan pemerataan pembangunan di daerah Kabupaten Bima.

Berita di Sinar Harapan (4 Juli 1972) memuat satu judul berita tentang "Demonstrasi Anti Bupati Bima". Dalam berita yang dimuat di Sinar Harapan menginformasikan kepada publik bahwa demonstrasi yang dipelopori oleh *Dou Donggo* merupakan bentuk ekspresi atas ketidaksukaan *Dou Donggo* yang dipimpin oleh orang luar, salah satu berita yang menggiring opini agar publik bersikap antipatik atas gerakan sosial tersebut. Pada hari yang sama dalam media yang berbeda di Harian KAMI (4 Juli 1972) memuat juga berita yang berisi kecaman Gubernur atas aksi massa di Bima "Gubernur NTB Anggap Rakyat Donggo Berontak". Selain di media, kecaman Gubernur dipublikasikan melalui spanduk

besar yang terpampang di Depan Kantornya, spanduk itu berisi tulisan "Mengutuk Peristiwa Donggo".

Tidak berhenti sebatas mengancam, karena takut adanya gerakan sosial lanjutan di Bima, Gubernur NTB memerintahkan Korem 162/WR, NTB Mataram turun tangan. Bahkan Gubernur meminta bantuan pasukan ke Pangdam IX Udayana, di Denpasar Bali memberangus masyarakat Donggo terutama tokoh-tokoh penggerak aksi massa. Selang dua hari Gubernur mengutuk peristiwa Donggo, di media yang sama muncul tulisan Burhan Djabir Magenda, seorang Aktivis yang juga pimpinan redaksi (belakangan pernah menjadi anggota DPR RI dari Praksi Partai Golkar dan sekarang menjadi Guru Besar di FISIP UI). Tulisannya berjudul "Demonstrasi Orang Donggo di Bima Potret Sebuah Krisis" dimuat dalam Harian KAMI (6 Juli 1972). Selain membangun opini lewat media. Burhan Djabir Magenda dkk mengadakan rapat konsolidasi di kalangan mahasiswa *Mbojo* yang ada di Jakarta guna membahas dan mengeluarkan sikap dan tuntutan agar pemerintah bertanggung jawab atas kekerasan aparat dan ketidakberpihakan Soeharmadji terhadap rakyat Bima (Magenda dalam H. Kako dan La Nora, 2017: xxxix). Mereka mengeluarkan sikap sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudaranya di Donggo.

Pemberitaan yang konstruktif dan kontaproduktif diberitakan oleh Media *Abadi*. Gubernur NTB melalui konferensi persnya tanggal 11 Juli 1972, di Media *Abadi* memberi penjelasan terkait gerakan sosial yang dipelopori oleh *Dou Donggo* sebagai gerakan pemberontakan. Karena itu, Media *Abadi* memuat sebuah tulisan yang berjudul "Ada 'Pemberontakan' di Bima". Gerakan sosial di Bima tahun 1972 dinilai sebagai gerakan sosial yang melakukan gerakan makar atas tatanan yang ada juga dianggap sebagai sebuah gerakan pemberontakan seperti G. 30 S/Gestok maupun gerakan DI/TII.

Selang tiga hari kemudian, Media *Abadi* memberitakan lagi gerakan sosial di Bima sebagai demonstrasi akibat adanya ketimpangan pembangunan. Masyarakat Donggo menuntut keadilan dari Bupati Bima, dengan memuat sebuah tulisan yang berjudul "Rakyat Bima Tuntut Pembangunan yang Wajar" tanggal 14 Juli 1972. Media *Abadi* setelah mendapatkan kebenaran informasi dan fakta-fakta di lapangan, mulai bersikap obyektif dalam pemberitaan-pemberitaannya di media. Hal ini nampak dalam sebuah berita yang dimuatnya bertajuk "Tanggapan Mahasiswa Bima Surabaya Tentang Demonstrasi di Bima" sebuah berita yang lahir dari adanya pernyataan sikap Mahasiswa Bima yang mengenyam pendidikan di Kota Surabaya. Sementara mahasiswa Donggo Bima Jakarta menyampaikan yang menyampaikan pernyataan sikap adalah pelajar dan mahasiswa dari Kecamatan Donggo yang bernaung dalam organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Donggo Bima Jakarta (IPMDB-Jakarta). Media sosial yang tidak memberitakan gerakan sosial di Bima saat itu hanyalah TVRI, karena TVRI merupakan chanel resmi pemerintah

E. KESIMPULAN

Gejolak sosial Era Orde Baru sempat menggemparkan *Dana Mbojo*, menggeliatnya gerakan sosial disebabkan oleh adanya keterlibatan elit-elit lokal dalam membangkitkan kesadaran massa dari Donggo. Elit-elit lokal yang sangat

berpengaruh terdiri dari berbagai kalangan diantaranya Abdul Madjid Bakry yang dikenal sebagai representase kaum Agamawan. Adapun H. Kako diasosiasikan sebagai tokoh kebatinan (tokoh mistisisme lokal). Selain itu, Jamaluddin H. Yasin dan Muhammad Ali (H. Ale) sebagai representasi pemerintah Desa (elit-elit Desa yang berpengaruh). Sementara Abas Oya sebagai representase kaum muda sekaligus kaum intelektual aktivis jebolan Universitas Mustopo (Beragama) Jakarta. Elit-elit inilah yang menjadi arsitek dalam membangun opini publik dan merancang strategi gerakan.

Gerakan sosial yang dirancang sedemikian rupa akhirnya menggema dalam bentuk aksi massa yang terjadi tanggal 22 Juni 1972. Aksi massa lahir sebagai puncak dari ekspresi kekecewaan *Dou Donggo* atas represifitas rezim, ketimpangan pembangunan, dan keserakahan penguasa selama berkuasa di daerah Bima. Peristiwa Donggo 1972 sejatinya menggugat rezim Soeharmadji sebagai representase rezim Orde Baru di Bima, menuntut keadilan agar memperhatikan pembangunan yang telah diabaikannya selama berkuasa. Gejolak sosial 1972 mengundang perhatian media baik lokal, media nasional maupun media internasional dalam memberitakan sebuah peristiwa yang pernah terjadi di Bima Era Orde Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi* (11 Juli 1972). "Ada 'Pemberontakan' di Bima".
- Abadi* (14 Juli 1972). "Rakyat Bima Tuntut Pembangunan yang Wajar".
- Abadi* (1972). "Tanggapan Mahasiswa Bima Surabaya tentang Demonstrasi di Bima".
- Arendt, H.W. (ed). 1983. *Pembangunan dan Pemerataan*. Jakarta: LP3ES.
- Feith, Herbeth. "Rezim-rezim Developmentalis di Asia; Kekuatan Lama, Kerawan Baru". *Prisma*, 11, XI (November, 1980).
- Harian KAMI* (30 Juni 1972). "3000 Penduduk Bima Demontran Tuntut Bupati Mundur".
- Harian KAMI* (4 Juli 1972). "Gubernur NTB Anggap Rakyat Donggo Berontak". Jakarta.
- Harian KAMI* (6 Juli 1972). Demokrasi Orang Donggo di Bima Potret Sebuah Krisis.oleh Burhan Djabir Magenda. Jakarta.
- Harian KAMI* (8 Juli 1972). "Masyarakat Bima Jakarta Bahas Demonstrasi Donggo". Jakarta.
- Harian KAMI* (8 Juli 1972). Mahasiswa Bima Yogya. "Operasi Militer Saja Tidak Menyelesaikan Sebab-Sebab Peristiwa Donggo".
- Harian KAMI* (31 Juli 1972). "Tokoh Masyarakat yang di Tahan Tewas Karena Penyiksaan". Oleh Mustakim dan Israel IPMDB Jakarta.
- Hill, Hal. 1996. *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966; Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jones. 2009. *Pengantar Teori Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Mustahid dan La Nora, Ghazaly Ama. 2017. *Peristiwa Donggo 1972: Sketsa Pergolakan Politik Bima Era Orde Baru*. Mataram: PT. Suara Niaga Nusantara (Lombok Post Group).
- Praktikno. 1998. *Keretakatan otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi* dalam Jurnal JSP Vol. 2, No. 2, Nopember 1998.
- Prawiro, Radius. 1998. *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi; Pragmatisme dan Aksi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sinar Harapan* (4 Juli 1972). "Demonstrasi Anti Bupati di Bima".
- Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan Politik dalam Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusron. 2009. *Elite Lokal dan Civil Society : Kediri di tengah Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.